

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Ainul Yaqin, *Constitutional Question: Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia, Jakarta, 1997.
- , *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi: Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Setara Press, Malang, 2015.
- A'an Efendi, dkk, *Penelitian Hukum Doktrinal*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019
- Aminuddin Ilma, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- A.B. Kusuma, *Sistem Pemerintahan "Pendiri Negara" Versus Sistem Presidensial "Orde Reformasi"*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- , *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Abintoro Prakoso, *Politik Hukum Indonesia*, LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2019
- Abintoro Prakoso, *Sejarah Hukum Agraria*, Setara Press, Malang, 2021
- A.P. Parlindungan, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Bagian III, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

- Ali Taher Parasung, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, Grafindo Books Media, Jakarta, 2014.
- Agus Trilaksana, dkk, *Reformasi Agraria di Indonesia: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*, Unesa University Press, Surabaya, 2019.
- Ben Anderson, *Revoloesi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1994-1946 (Java in Time of Revolution, Occupation and Resistence 1994-1946)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Benedict Anderson, *Komunitas-komunitas Imajiner: Renungan Tentang Asal Usul dan Penyebaran Nasionalisme (Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism)*, Pustaka Pelajar dan Insist Press, Yogyakarta, 1993.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- , *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Agraria dan Pertanahan*, Permata Press, Surabaya, 2015.
- Barid Hardianto, *Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono (Dari Formulasi ke Implementasi)*, STPN Press, Yogyakarta, 2021.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Bernard Limbung, *Politik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2014.
- Bushar Muhammad, *Pengantar Hukum Adat*, Ichtiar, Jakarta, 1961.
- Bryan A. Garner, *Black,s Law Dictionary, 11th Edition*, Thomson Reuters, Canadian, 2019.
- B Ter Har, B, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Penebar Swadaya, Jakarta, 1999.
- Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*, Bina Desa, KPA, dan ARC, Bandung, 2011.
- Darji Darmodiharjo, dkk, *Santiaji Pancasila, Usaha Nasional*, Surabaya, 1991.

- Daradjati dan Osa Kurniawan Ilham, *Pejambon 1945: Konsensus Agung Para Peletak Fondasi Bangsa*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020.
- Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Diana R.W. Napitupulu, *Pendaftaran Tanah, Pendaftaraan Hak atas Tanah dan Peralihannya*, UKI Press, Jakarta, 2022.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Djokosoetono, *Ilmu Negara: Sumbangan Alumni FH-UI pada Dies Natalis ke 22, 22 Oktober 1972*, IN-HILL-CO, Jakarta, 2006.
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni, Bandung, 1986
- Endang Suhendar dan Ihdhal Kasim, *Tanah Sebagai Komoditas: Kajian Kritis atas Kebijakan Tanah Orde Baru*, ELSAM, Jakarta, 1996.
- Endang Suhendar, dkk, *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*, Akatiga, Bandung, 2002.
- Emil Salim, dkk, *Keadilan Sosial dan Kemakmuran*, LP3ES, Jakarta, 2015.
- Edy Ikhsan, *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021.
- Gow Giok Siong, *Masalah Agraria*, Keng Po, Jakarta, 1955.
- George Mc Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia (Nationalism and Revolution in Indonesia)*, Komunitas Bambu, Depok, 2013.
- Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria untuk Pemula*, Sekretariat Bina Desa, Jakarta, 2005.
- GeorgianWranke, *Gademer: Hermeneutika, Tradisi dan Akal Budi (Gademer, Hermeneutics, Tradition and Reason)*, IRCiSod, Yogyakarta, 2021.
- Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi: Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang*, LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2014.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif (The Pure Theory of Law)*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- , *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (The General Theory of Law and State)*, Nusa Media, Bandung, 2011.

- I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015.
- dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018.
- Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial: Sumber Pembangunan Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1986.
- Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- , *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Iman Soetikinjo, *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan Ranah yang Berdasarkan Pancasila*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1985.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- , *Teori Hierarki Norma Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2021
- , *Konstitusi Keadilan Sosial*, Kompas, Jakarta, 2022.
- , *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010.
- , *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1994
- , dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
- Jan Bremen, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial (Control of Land and Labour in Colonial Java)*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan (The Theory of Legislation)*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2016.
- Ingleson, John, *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934 (Road to Exile: The Indonesian Nationalist Movement 1927-1934)*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- J.H.A. Logeman, 1982, *Keterangan-keterangan Baru Tentang Terjadinya Undang-undang Dasar Indonesia 1945 (Nieuwe Gegevens Over Het*

- Onstoaan Van De Indonesische Gronwet Van 1945), Aries Lima, Jakarta, 1982.
- Jeffery M. Paige, Revolusi Agraria: Gerakan Sosial dan Pertanian Ekspor di Negara-Negara Dunia Ketiga (*Agrarian Revolution: Social Movement and Export Agriculture in the Underdeveloped World*), Imperium, Yogyakarta, 2011.
- John Rawls, Teori Keadilan (*A Theory of Justice*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- James C. Scot, Moral Ekonomi Petani: Pergolakan Subsistensi di Asia Tenggara (*The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*), LP3ES, Jakarta, 1981.
- John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (*Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- J.J. Von Schmid, Pemikiran Tentang Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1979.
- Julius Sembiring, Tanah Negara, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Joenadi Efendi, Sejarah Hukum, Jakad Publishing, Surabaya, 2019.
- Karl J. Pelzer, Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani (*Planters Against Peasant: The Agrarian Struggle in East Sumatera 1947-1958*), Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualitasnya, Paradigma, Yogyakarta, 2018.
- , Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2022.
- Kuntowijoyo, Petani, Priyayi dan Mitos Politik, Mata Bangsa, Yogyakarta, 2016.
- Karen Leback, Teori-teori Keadilan (*Six Theory of Justice*), Nusa Media, Bandung, 2020.
- King Faisal Sulaiman, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial, Rajawali Pers, Depok, 1985.
- K.J. Veeger, Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, Gramedia, Jakarta, 1985.

- Khudzaifah Dimiyati, dkk, Geneologi Negara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020.
- Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024, KPA, Jakarta, 2023.
- L.R. Baskoro, dkk, Muhammad Yamin: Penggagas Indonesia yang Dihujat dan Dipuji, Gramedia, Jakarta, 2016.
- Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction, W.W. Norton and Company, Newyork, USA, 1930.
- Muhammad Arman, Negara: Sebuah Masalah Masyarakat Adat, Lamalera, Yogyakarta, 2020.
- Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- M.D.A. Freeman, LLOYD'S Introduction to Jurisprudence, Sweet and Maxwell LTD, London, 2001.
- Martin Heidigger, Dialektika Kesadaran Perspektif Hegel (*Hegel's Concept of Experience*), Ikon Teralitera, Yogyakarta, 2002.
- Magarito Kamis, Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia, Setara Press, Malang, 2014.
- M. Solly Lubis, Pembahasan UUD 1945, Alumni, Bandung, 1997.
- Moh Mahfud M.D, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- , Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2014.
- , Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- , Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. LP3ES, Jakarta, 2007.
- Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, LP3ES, Jakarta, 1987.
- M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (*A History of Modern Indonesia*), Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001.
- Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Marsilam Simanjuntak, Pandangan Negara Integristik: Sumber, Unsur dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945, Grafiti, Jakarta, 1994.

- Mochammad Tauhid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Buku I, Yayasan Bina Desa, Jakarta, 2011.
- , Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Buku II, Yayasan Bina Desa, Jakarta, 2011.
- Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1951.
- Mohamad Shohibuddin dan M. Nazir, Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan, STPN Press dan Sajogyo Intitute, Yogyakarta, 2012.
- Noer Fauzi Rachman, Land Reform dari Masa ke Masa, Tanah Air Beta dan KPA, Yogyakarta, 2012.
- Notonegoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Nugroho Notosusanto, Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara, Balai Pustaka, Jakarta, 1981.
- Nurus Zaman, Politik Hukum Pengadaan Tanah: Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Purwadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, Sendi-sendi Hukum Agraria, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Roeslan Abdulgani, Sosialisme Indonesia, Jajasan Prapantja, Jakarta, 1964.
- Rikard Bagun (ed), Bung Hatta, Kompas, Jakarta, 2003.
- Rex Mortimer, Indonesian Communism Under Sukarno, Ideologi dan Politik 1959-1965 (*Indonesian Communism Under Sukarno, Ideology and Politics, 1959-1965*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2018.
- Sukarsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Saafroedin Bahar, dkk, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995.
- Sri Hajati, dkk, Politik Hukum Pertanahan Indonesia, Kencana, Jakarta, 2022.

- Sartono Kartodirdjo, Ratu Adil, Sinar Harapan, Jakarta, 1984.
- Sudikno Martokusumo, Perundang-undangan Agraria di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia, Alumni, Bandung, 1982.
- Soekarno, Indonesia Menggugat: Pembelaan dihadapan Pengadilan Kolonial, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2012.
- Suharningsih, Tanah Terlantar: Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009.
- Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal, Satu Abad Bung Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan, UI Press, Jakarta, 2022.
- Suharizal, Reformasi Konstitusi 1998-2002: Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 1945, Anggrek Law Firm, Padang, 2022.
- Supomo dan Djokusutono, Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848, Djambatan, Jakarta, 1950.
- , Sejarah Politik Hukum Adat 1848-1928, Djambatan, Jakarta, 1954.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Depok, 2022.
- S.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Syaiful Bahari, Petani dalam Perspektif Moral Ekonomi dan Politik Ekonomi, dalam Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi, AKATIGA, Bandung, 2002.
- , Tanah untuk Penggarap: Merintis Tataguna Lahan di Pasir Randu, Sekretariat Bina Desa, Jakarta, 2005.
- Tri Candra Aprianto, Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember, STPN Press, Yogyakarta, 2016.
- TB Massa Djafar, dkk, Sistem Demokrasi Pancasila, Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Tom Gunadi, Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945, Angkasa, Bandung, 1981.

- Tarli Nugroho, *Polemik Ekonomi Pancasila: Pemikiran Catatan 1965-1985*, Mubyarto Insitut, Yogyakarta, 2016.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Tody Sasmita, dkk, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUU-X/2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010)*, STPN Press, Yogyakarta, 2014.
- Usep Setiawan, dkk, *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Penyelesaian Konflik Agraria: Hasil Lokakarya Persiapan Menuju Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA)*, Komnas HAM-KPA-HuMA-Walhi-Bina Desa, Jakarta, 2004.
- Westi Utami Sarjita, *Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa*, STPN Press, Yogyakarta, 2021.
- Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, STPN Press, Yogyakarta, 2014.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2021
- Zainal Arifin Hoesain, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Rajawali Pers, Depok, 2013.
- Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

B. Jurnal/Majalah Ilmiah

- Agung Wibowo, *Pendekatan Sejarah Berpikir Hukum*, Jurnal HuMa, Perkumpulan HuMa (tanpa tahun).
- Darwn Awat dan Silverio R.L. Aji Sampurno, *Membela Petani Kecil: Pelaksanaan Land Reform pada Masa Pemerintahan Presiden Sukarno (1960-1966)*, Insist Press, November 2011.
- Evy Indriasari, *Perkembangan Hak Menguasai Negara dalam Hukum Pertanahan Nasional*, Jurnal Pembaharu Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2021.
- Fitra Alvian dan Dian Aries Mujiburohman, *Implementasi Reforma Agraria pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo*, Jurnal Tunas Agraria, Volume 5, Nomor 2, 2022.

- Gunanegara, Kebijakan Negara pada Pengaturan Hak Atas Tanah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2022.
- Heriyanto, Analisis Kebijakan Agraria Pasca Reformasi, *Jurnal Solusi*, Volume 20, Nomor 3, September 2022.
- Habib Ferian Fajar, dkk, Strategi Kebijakan Reforma Agraria dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial dengan Berasaskan Konstitusi, *Jurnal Hukum Lex generalis*, Volume 3, Nomor 9, September 2022.
- H. Cecep Cahya Supena, Analisis Historis Tentang Pembaharuan Politik Hukum Nasional Indonesia di Awal Era Reformasi, *Jurnal Moderat*, Volume 5, Nomor 4, November 2019.
- H. Muchsin, Kebijakan Pertanahan Nasional (Telaah Kritis dalam Perspektif Historis), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4, Tahun XXVIII, Juli-Agustus 1998.
- Julius Sembiring, Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Agraria, *Jurnal Bhumi*, Volume 2, Nomor 2, November 2016.
- Jemmy Sondakh, Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014.
- J. Ronald Mawuntu, Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume XX, Nomor 3, April-Juni 2012.
- King Faisal Sulaiman, Polemik Fungsi Sosial Tanah dan Hak Menguasai Negara Pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021.
- Mukmin Zakie, Konsepsi Hak Menguasai oleh Negara atas Sumberdaya Agraria, *Jurnal Hukum* Nomor. 29, 2005.
- , Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda, *Jurnal Legality*, Volume 24, Nomor 1, 2016.
- Masyrullahushomad dan Sudrajat, Penerapan *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria 1870): Periode Awal Swastanisasi Perkebunan di Pulau Jawa, *Jurnal Historia*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2019.
- Nizammudin, 2016, Hak Menguasai Negara dalam Sistem Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3.

- Nina Amelia Novita dkk, Implikasi Penafsiran Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Hukum Agraria Pada Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, *Law Review*, Volume XIX, Nomor 2, 2019.
- Nih Luh Ariningsih Sari, Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah dalam Hukum Tanah (UUPA) dan Konstitusi, *Jurnal Ganec Swara*, Volume 15, Nomor 1, 2021.
- O.K. Saidin, Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda atas Tanah Konsensi Kesultanan Deli (Studi Awal Hilangnya Hak-Hak atas Sumber Daya Alam Masyarakat Adat), *Jurnal Yustisia*, Volume 4, Nomor 1, Januari-April 2015.
- Rayyan Dimas Sutadi, dkk, Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi), *Jurnal Tunas Agraria*, Volume 1, Nomor 1, September 2018.
- Ririn Darini dan Miftahuddin, Nasionalisasi Perusahaan Asing di Jawa Timur 1950-1966, *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, Volume 9, Nomor 1, 2018.
- Syaiful Bahari, Konflik Agraria di Wilayah Perkebunan: Rantai Sejarah yang Tak Berujung, *Jurnal Analisis Sosial*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2004.
- , Land Reform di Indonesia: Tantangan dan Prospek ke Depan, *Jurnal Karsa (Jurnal Pembaruan Pedesaan dan Agraria)*, Edisi 1, 2007.
- , Reforma Agraria, Kebijakan Setengah Hati: Refleksi Perjalanan Reforma Agraria Tahun 2010, *Bulletin Bina Desa*, 2012.
- Syawaluddin Hanafi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Expose*, Volume 16, Nomor 1, 2017.
- Suwarno Abadi, Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi, *Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra*, Surabaya, September 2015.
- Saturnino M. Borras Jr and Terry McKinley, The Unresolved Land Reform Debate: Beyond State-Led or Market-Led Models, *Policy Research Brief International Peverty Center UNDP*, Nomor 2, November 2006.
- Supriyanto, Implementasi Kebijakan Pertanahan Nasional, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 3, September 2008.
- Sukardi, Perspektif Kritis Kebijakan Pembaharuan Agraria Indonesia dari Rejim Orde Baru ke Rejim Reformasi, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 3, Nomor 2, 2004.

Syahriza Alkohir Anggoro, Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 10, Nomor 1, Juni 2019.

Tri Candra Aprianto, Pelaksanaan Agenda Reforma Agraria Awal Masa Orde Baru (1967-1973), Jurnal Historia, Volume 3, Nomor 2, Januari 2021.

Yance Arizona, Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Epistema Institute, Jakarta, 2011.

Zainul Akmal, Tafsir Yuridis Filosofis Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 3, Nomor 1, Juni 2021.

C. Artikel

Syaiful Bahari, Negara dan Hak Rakyat atas Tanah, Harian Kompas, 13 Mei 2005.

-----, Konstitusi dan Politik Agraria, Harian Kompas, 26 September 2012.

-----, Politik Agraria Jokowi-JK, Harian Media Indonesia, 7 April 2018.

-----, Kegagalan Pembangunan Pertanian di Indonesia, Harian Kompas, 17 Januari 2004.

D. Tesis

Syaiful Bahari, Gagasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memeriksa Pengaduan Konstitusional Ditinjau dari Negara Hukum Pancasila, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2016.

E. Disertasi

Ahmad, Tafsir Konstitusi: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam dalam Perspektif Demokrasi Ekonomi, Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, 2020.

Artje Tehupeiory, Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Disertasi, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.

Bayu Dwi Anggono, *Asas Materi Muatan yang Tepat dalam Pembentukan Undang-Undang, Serta Akibat Hukumnya: Analisis Undang-Undang Republik Indonesia yang Dibentuk pada Era Reformasi (1999-2012)*, Disertasi, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

Lieke Lianadevi Tugali, *Fungsi Sosial Hak atas Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Disertasi, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Muhammad Bakri, *Pembatasan Hak Menguasai Tanah oleh Negara dalam Hubungannya dengan Hak Ulayat dan Hak Perorangan atas Tanah*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.

Suparjo, *Manifestasi Hak Bangsa Indonesia dan Hak Menguasai Negara dalam Politik Hukum Agraria Pascaproklamasi 1945 Hingga Pascareformasi 1998 (Kajian Teori Keadilan Amartya K. Sen)*, Disertasi, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

Valerine Jaqueline Leonore Kriekhoff, *Kedudukan Tanah Dati Sebagai Tanah Adat di Maluku Tengah: Suatu Kajian dengan Memanfaatkan Pendekatan Antropologi Hukum*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1991.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1571.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Lembaran Negara Nomor 174 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117.

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106.
- Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, Lembaran Negara Nomor 162 Tahun 1958.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri, Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara 4411.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Lembaran Negara Nomor 308 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara 5613.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Nomor 147 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembagunan untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2003.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841.
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Lembaran Negara Nomor 280 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2322.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2702.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Nomor 362.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6632.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6631.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Nomor 102 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6885.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran tanah, Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6683.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Pelaksanaan Landreform.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Lembaran Negara Nomor 172 Tahun 2018.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2023

G. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;



RIWAYAT HIDUP

Nama : Syaiful Bahari
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 20 Maret 1967
Alamat Rumah : Jl. H. Baneng No. 4 RT 003/RW 006, Kelurahan Ceger,
Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur
Alamat Kantor : MAP Law, Centro City Unit AS 11-12, Kedoya Utara,
Jakarta Barat, Jakarta.

A. PENDIDIKAN :

1. Sekolah Dasar di SDN Utan Kayu 07 Pagi, Jakarta Timur, tamat tahun 1980.
2. Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama di SMP Fajar, Jakarta Timur, tamat tahun 1983.
3. Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas di SMAN 36, Jakarta Timur, tamat tahun 1986.
4. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1986-1990).
5. Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta, tamat tahun 2013 (Judul Skripsi: Tinjauan Yuridis Perjanjian Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha: Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 11/KPPU/I/2005)
6. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia, tamat tahun 2016 (Judul Tesis: Gagasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memeriksa Pengaduan Konstitusional Ditinjau dari Negara Hukum Pancasila).

B. PENGALAMAN KERJA:

1. Kepala Bidang Penelitian dan Evaluasi di Sekretariat Bina Desa (1994 – 1999)

2. Wakil Direktur Sekretariat Bina Desa (2000 – 2005)
3. Pengurus Perkumpulan Gugus Nusantara (2007)
4. Evaluator Program Community Development Projects disponsori Life Internasional - Japan
5. Evaluator Program Japan Embassy for Small Grant Project (2006)
6. Peneliti Lepas pada Program Impact of Globalization on Rural Areas disponsori ASIADHRRA (2004)
7. Peneliti Lepas Program Portrait of Small Rural Enterprises in Java Villages disponsori Canadian Rural Development (2002 – 2003).
8. Direktur Yayasan PERAN INDONESIA (2007-2012)
9. Legal Analyst MUSPANI ASSOCIATES (2012-2013)
10. Managing Partner SAT & ASSOCIATES (2014-2015)
11. Managing Partner SYAIFUL ANTONI & ASSOCIATES (2016 – sekarang)
12. Partner di MAP LAW (2020-sekarang)
13. Penulis, peneliti dan pemerhati masalah agraria dan pertanian di media massa.

C. PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Dewan Redaksi Majalah Keadilan – Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1987-1990).
2. Pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (1987-1989).
3. Dewan Pengurus Gugus Nusantara (2007)
4. Pendiri Konsorsium Pembaharuan Agraria (1997)
5. Dewan Penasehat ALIANSI PETANI INDONESIA (2008 – Sekarang)
6. Ketua Umum PETANI NasDem (2014 – Sekarang)
7. Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia/APKASINDO (2019-sekarang).
8. Ketua Umum Komunitas Industri Beras Rakyat (2022-sekarang)

D. Karya Ilmiah

1. Politik Pertanian dan Prospek Tataniaga yang Dilematis, Sekretariat Bina Desa, Jakarta, 1995.
2. Gerakan dan Pertumbuhan Organisasi Petani Indonesia Era 1980-an, Sekretariat Bina Desa, Jakarta, 1999.
3. Merintis Kemandirian Ekonomi Rakyat: Konsep dan Pengalaman, Sekretariat Bina Desa, Jakarta, 1997.
4. Tanah untuk Penggarap: Merintis Tataguna Lahan di Pasir Randu, Sekretariat Bina Desa, Jakarta, 2005.
5. Konflik Agraria di Wilayah Perkebunan: Rantai Sejarah yang Tak Berujung, Jurnal Analisis Sosial, Volume 9, Nomor 1, Maret 2004.
6. Petani dalam Perspektif Moral Ekonomi dan Politik Ekonomi, dalam Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi, AKATIGA, Bandung, 2002.
7. Bina Desa Komitmen Kepada UUPA 1960 dan Pembangunan Desa, Sekretariat Bina Desa, Jakarta.
8. Land Reform di Indonesia: Tantangan dan Prospek ke Depan, Jurnal Karsa (Jurnal Pembaruan Pedesaan dan Agraria), Edisi 1, 2007.
9. Reforma Agraria, Kebijakan Setengah Hati: Refleksi Perjalanan Reforma Agraria Tahun 2010, Bulletin Bina Desa, 2012.
10. Negara dan Hak Rakyat atas Tanah, Harian Kompas, 13 Mei 2005.
11. Konstitusi dan Politik Agraria, Harian Kompas, 26 September 2012.
12. Politik Agraria Jokowi-JK, Harian Media Indonesia, 7 April 2018.
13. Kegagalan Pembangunan Pertanian di Indonesia, Harian Kompas, 17 Januari 2004.